

10-30-2022

FENOMENA CANCEL CULTURE DALAM INDUSTRI HIBURAN TIONGKOK

Kintara Ayudarma

Program Studi Sastra Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,
kintara.ayudarma@ui.ac.id

R. Tuty Nur Mutia Enoch Muas

Universitas Indonesia, tutymuas@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura>



Part of the [Other Languages, Societies, and Cultures Commons](#), [Philosophy Commons](#), and the [South and Southeast Asian Languages and Societies Commons](#)

Recommended Citation

Ayudarma, Kintara and Muas, R. Tuty Nur Mutia Enoch (2022) "FENOMENA CANCEL CULTURE DALAM INDUSTRI HIBURAN TIONGKOK," *Multikultura*: Vol. 1: No. 4, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura/vol1/iss4/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Multikultura by an authorized editor of UI Scholars Hub.



FENOMENA *CANCEL CULTURE* DALAM INDUSTRI HIBURAN TIONGKOK

Kintara Ayudarma

kintara.ayudarma@ui.ac.id

R. Tuty Nur Mutia

tutymuas@ui.ac.id

Program Studi Sastra Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

ABSTRAK

Cancel Culture atau dikenal sebagai aksi boikot merupakan fenomena memboikot seseorang akibat mengucapkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang ada di masyarakat. Aksi boikot ini banyak terjadi di media sosial dan mayoritas menargetkan publik figur khususnya seorang selebriti. Fenomena *Cancel Culture* ramai terjadi di berbagai negara, termasuk di Tiongkok. Artikel ini membahas tentang pemanfaatan fenomena *Cancel Culture* oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan dan dampaknya bagi perkembangan industri hiburan di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, pemberitaan, dan opini yang diperoleh secara luring maupun daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam industri hiburan Tiongkok umumnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah menggunakan aksi pemboikotan untuk mengatur kembali lingkungan industri hiburan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat akan nilai budaya yang dianut Tiongkok.

KATA KUNCI: *Cancel Culture*, selebriti, industri hiburan, Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok

PENDAHULUAN

Cancel Culture adalah fenomena penolakan, pemboikotan, atau penghentian dukungan di depan umum kepada orang atau kelompok karena pandangan atau tindakan yang tidak bisa diterima secara sosial atau moral (Dictionary.com). Eve Ng (2020) menjelaskan *Cancel Culture* merupakan penarikan segala jenis dukungan dari orang yang dinilai telah mengatakan atau melakukan perbuatan yang tidak dapat diterima publik, umumnya dari perspektif etika dan norma. *Cancel Culture* dapat dikategorikan sebagai perilaku boikot yang dapat terjadi kepada setiap individu, namun umumnya menargetkan figur publik khususnya selebriti (Sills, S., Pickens, C., Beach., Jones., Calder-Dawe, O., Benton-Greig, P., Gavey, N., 2016; Wahyudiputra, A., Amrullah, A. T. Adrian D., 2021). Fenomena *Cancel Culture* biasanya terjadi di media sosial dimana sekelompok orang dengan sengaja membagikan cerita, foto, potongan video, atau rekaman suara yang menunjukkan perilaku buruk atau kesalahan seorang figur publik. Kemudian publik memboikot karya-karyanya, menghilangkan pengaruhnya dan



tidak lagi memberikan tempat di hadapan publik (Wahyudiputra et al., 2021).

Saat ini fenomena *Cancel Culture* terjadi di berbagai negara, termasuk Tiongkok. Dalam bahasa Mandarin, *Cancel Culture* diterjemahkan sebagai 取消文化 *qǔxiāo wénhuà*, 取消 *qǔxiāo* berarti pembatalan dan 文化 *wénhuà* berarti budaya. Meskipun istilah *Cancel Culture* baru mulai dikenal beberapa tahun belakangan, namun sebenarnya budaya boikot sudah melekat dalam paham komunis sejak dulu. Dalam bukunya yang berjudul *Cancel Culture*, Alan Dershowitz (2020:17-21) mengatakan bahwa *Cancel Culture* merupakan bentuk baru dari Stalinisme, yaitu prinsip politik, ekonomi dan sosial yang dikembangkan oleh Joseph Stalin berdasarkan Marxisme dan Leninisme. Joseph Stalin adalah seorang anggota Partai Komunis dan pemimpin negara Uni Soviet tahun 1929-1953. Stalin dikenal sebagai seorang diktator yang kejam. Pada masa pemerintahannya, Stalin membatasi kebebasan rakyatnya dan menghilangkan orang-orang yang tidak lagi dianggap sebagai bagian dari sejarah Uni Soviet dari kumpulan foto-foto sejarah. Seluruh rakyat harus tunduk dan patuh padanya. Siapapun yang berani menentang akan ditangkap dan dijatuhi hukuman.

Pada masa kepemimpinan Stalin, banyak pemimpin dan anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang melakukan kunjungan ke Uni Soviet untuk keperluan studi atau bekerja di Komintern. Begitu juga sebaliknya, anggota partai komunis Uni Soviet secara terbuka dapat mengunjungi Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok mendapat pengaruh dari ajaran Leninisme-Stalinisme dan menerapkan sistem pemerintahan mirip seperti yang diterapkan oleh Stalin, dengan ideologi komunis dimana kekuasaan terpusat pada PKT (Wittfogel, 1951: 23). PKT memiliki hak penuh atas negara dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat (McGregor, 2010). Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah memanfaatkan fenomena *Cancel Culture* yang berkembang di masyarakat untuk memperkuat pengendaliannya atas industri hiburan di Tiongkok.

Seperti yang telah disebutkan di atas, umumnya fenomena *Cancel Culture* menargetkan figur publik khususnya selebriti. Selebriti di Tiongkok dijadikan alat untuk menyebarkan nilai-nilai yang dijunjung negara. Dalam segala kesempatan, selebriti dituntut untuk menampilkan citra yang baik, berperilaku sesuai moral dan terutama menunjukkan loyalitasnya kepada negara. Tuntutan tersebut didasari oleh pemahaman bahwa selebriti merupakan figur publik yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan menjadi panutan bagi penggemar mereka. Selebriti yang melakukan penyimpangan diberikan sanksi oleh pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan industri hiburan sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat Tiongkok. Selebriti dituntut untuk meminta maaf kepada publik, didiskualifikasi dari penghargaan, proyek dan kontrak kerja yang sudah ditandatangani dibatalkan, atau bahkan dijatuhi sanksi pidana. (Sullivan & Kehoe, 2019:6).

Pemerintah juga membuat daftar peringatan (警示名单 *jǐngshì míngdān*) atau disebut “daftar hitam” yang berisi nama-nama figur publik yang dianggap telah melanggar peraturan. Mereka tidak lagi diizinkan untuk tampil atau mengadakan siaran di berbagai *platform* di Tiongkok. Dalam periode 2018-2021 sudah ada sembilan daftar hitam dengan total 446 nama. Daftar hitam ke-9 yang diumumkan pada bulan November 2021 memuat 88 nama, yang terdiri dari 85 *livestreamers* (orang yang suka melakukan siaran langsung di internet) dan tiga selebriti,



yaitu Zheng Shuang, Zhang Zhehan, dan Kris Wu. Kasus tiga orang tersebut menjadi rujukan utama penelitian dan penulisan artikel ini. Sedangkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan artikel ini adalah pemanfaatan fenomena *Cancel Culture* oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan, dan dampaknya terhadap perkembangan industri hiburan Tiongkok. Pembahasan atau analisis dilakukan dengan mengacu pada tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana perkembangan sistem *Cancel Culture* dalam industri hiburan Tiongkok. Kedua, bagaimana dampak praktik *Cancel Culture* terhadap selebriti yang terkena, dalam hal ini tiga kasus yaitu Kris Wu, Zheng Shuang, dan Zhang Zhehan menjadi contoh kasus. Ketiga, bagaimana dampak *Cancel Culture* terhadap industri hiburan Tiongkok.

Terkait fenomena *Cancel Culture*, sejauh penelitian yang penulis lakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas *Cancel Culture* dalam industri hiburan Tiongkok. Meskipun begitu, ditemukan sejumlah karya yang membahas *Cancel Culture* dalam berbagai perspektif. Di antaranya adalah, artikel *Zhang Ziyi and China's Celebrity-Philanthropy Scandals* yang ditulis oleh Elaine Jeffreys (2010). Artikel itu membahas perdebatan mengenai nilai kemanusiaan seorang selebriti dengan skandal Zhang Ziyi sebagai bahasan utama. Zhang Ziyi menerima kecaman dari masyarakat akibat tidak menepati janjinya menyumbang satu juta yuan bagi korban gempa bumi Sichuan pada tahun 2008. Artikel yang ditulis oleh Jonathan Sullivan & Seagh Kehoe (2019) berjudul *Truth, Good and Beauty: The Politics of Celebrity in China* membahas sejarah dan perkembangan industri hiburan Tiongkok dalam pantauan pemerintah. Artikel lainnya adalah *Governing entertainment celebrities in China: practices, policies and politics (2005–2020)* yang ditulis oleh Jian Xu dan Ling Yang pada tahun 2021. Dalam artikel itu Xu dan Yang membahas keadaan industri hiburan Tiongkok di tahun 2005 hingga tahun 2020. Di dalamnya juga disertakan nama-nama selebriti yang pernah terkena skandal dan konsekwensi yang harus diterimanya.

Penelitian dan penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan budaya. Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan budaya digunakan karena fenomena *Cancel Culture* termasuk ke dalam fenomena budaya dimana fenomena ini melibatkan karya-karya dalam industri hiburan seperti film, drama, iklan, musik dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas (Nazir, 2013: 93). Materi yang dijadikan sumber adalah buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita yang diperoleh secara luring maupun daring.

Perkembangan Praktik *Cancel Culture* dalam Industri Hiburan Tiongkok

Praktik *Cancel Culture* di Tiongkok berbeda dengan di negara lain. Aksi pemboikotan umumnya dimulai oleh komunitas masyarakat yang tidak memiliki kekuatan sosial, politik, maupun profesional (Romano, 2021). Mereka mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar agar suara mereka dapat tersampaikan. Umumnya, masyarakat yang memegang peran aktif dalam aksi pemboikotan seorang selebriti, sedangkan pemerintah turun tangan untuk mengambil tindakan jika diperlukan. Negara lainnya yang juga familiar dengan fenomena *Cancel Culture* adalah Korea



Selatan. Kasus *Cancel Culture* di Korea Selatan mayoritas disebabkan karena pelanggaran moral dan skandal pribadi seperti *bullying*, terlibat dalam skandal percintaan atau hal sensitif seperti agama. Masyarakat melakukan pemboikotan melalui media sosial dan memutuskan apakah perbuatan selebriti tersebut masih dapat ditoleransi atau tidak (Putri, 2021). Selebriti seakan bertanggung jawab kepada masyarakat, karena masyarakat dianggap memiliki peran besar dalam karir seorang selebriti. Sedangkan pemerintah turun tangan ketika masyarakat berhasil mengumpulkan petisi *online* atau kasus termasuk ke dalam pelanggaran hukum.

Berbeda dengan di Korea Selatan, praktik *Cancel Culture* di Tiongkok cenderung berhubungan dengan masalah nasionalisme dan moralitas. Selebriti dituntut untuk menampilkan citra yang baik di hadapan masyarakat dan mereka juga bertanggung jawab penuh kepada pemerintah. Proses pemboikotan di Tiongkok biasanya juga dimulai oleh sekelompok masyarakat, namun yang mengambil keputusan akhir adalah PKT (Jing Daily, 2022). Keputusan PKT bersifat mutlak dan tidak dapat diubah, tidak peduli seberapa besar kontribusi masyarakat dalam membela seorang selebriti.

Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melarang publikasi dan penampilan pihak-pihak yang dianggap menyimpang. PKT mengendalikan penyebaran informasi dan memiliki kendali penuh atas media hiburan. Media komunikasi digunakan untuk mencapai kekuasaan dan mengontrol negara dari segala dimensi. PKT menentukan jenis konten yang dapat ditayangkan atau dihapus dan menyaring konten yang sensitif di media sosial. Selebriti sebagai bagian utama dari industri hiburan berperan penting dalam menyebarkan propaganda. Selebriti dijadikan wajah negara dan bertanggung jawab menyebarkan nilai-nilai yang dijunjung negara terutama nasionalisme, melakukan segala sesuatu dengan hati-hati dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Selebriti yang melanggar akan menerima kecaman dan sanksi dari pemerintah.

PKT membentuk beberapa lembaga yang secara khusus bertugas menangani industri hiburan. Industri hiburan Tiongkok berada dalam pembinaan Departemen Propaganda (中共中央宣传部 *zhōngyāng xuānchuán bù*) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas penyensoran dan diawasi oleh tiga lembaga besar lainnya yaitu:

1. Kementerian Kebudayaan (中华人民共和国文化部 *Zhōnghuá rénmín gònghéguó wénhuà bù*), yang dibentuk pada tahun 1954 dan bertanggung jawab kepada Dewan Negara (中华人民共和国国务院 *Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guówùyuan*). Lembaga ini bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan bidang seni dan budaya. Selain itu, bertugas menentukan siapa dan apa yang dapat tampil di televisi (Hood, 2015). Misalnya dalam menentukan selebriti yang dapat berpartisipasi dalam acara-acara negara, dan menentukan musik yang dapat disebarluaskan di internet.
2. Biro Pusat Radio dan Televisi Negara (国家广播电视总局 *Guójiā guǎngbò diànshì zōngjú*)
Biro Pusat Radio dan Televisi Negara berada di bawah pengawasan Dewan Negara. Bertugas merancang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan televisi dan radio, mengamati konten dan melakukan penyensoran terhadap program televisi dan radio, melarang selebriti



yang terlibat skandal untuk tampil, serta mempromosikan program televisi dan radio Tiongkok ke dunia luar (Stratford, dkk., 2018).

3. Kantor Informasi Internet Negara (国家互联网信息办公室 *Guójiā hùliánwǎng xìnxī bàngōngshì*)

Kantor Informasi Internet Negara dibentuk pada tahun 2011 dan disahkan oleh Dewan Negara. Pada awalnya lembaga ini dibentuk untuk mengawasi dan mengatur konten di dunia maya serta melakukan penyensoran. Namun pada tahun 2018, Kantor Informasi Internet Tiongkok berada dibawah pengawasan langsung Komite Sentral PKT dan memiliki tugas baru yaitu, menyusun hukum untuk mengatur keamanan data di dunia maya.

Proses pemboikotan di Tiongkok umumnya berjalan seperti berikut. Keputusan pemerintah untuk melakukan pelarangan atau boikot awalnya diedarkan secara internal dan disebarakan ke berbagai platform seperti aplikasi video, musik, film, atau iklan. Kemudian lembaga berwenang akan “mencoret” selebriti tersebut dengan menghapus karyanya dan memerintahkan perusahaan untuk tidak merekrut mereka. Keputusan tersebut tidak selalu dirilis secara terbuka di media resmi namun biasanya bocor di internet. Jangka waktu pelarangan tidak pasti, bisa hanya dalam hitungan hari atau bahkan sampai seumur hidup. Jangka waktu pelarangan terkait kasus politik biasanya lebih lama dibandingkan kasus lainnya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi seorang selebriti untuk tidak menerima atau mengabaikan pelarangan tersebut. Semua tergantung dari dampak kasus dan keputusan PKT (Jing Daily, 2022).

Pada dasarnya ada dua alasan mengapa selebriti menerima pelarangan yaitu, melanggar aturan negara dan moral yang berlaku. Melanggar aturan negara berarti menyimpang dari nilai-nilai budaya atau melakukan tindak pidana. Fan Bingbing, aktris Tiongkok diboikot karena menghindari pembayaran pajak. Pada tahun 2018, Fan terlibat dalam kasus kontrak “yin-yang” dimana dibuat dua kontrak gaji dengan isi yang berbeda. Kontrak dengan nominal gaji lebih besar disimpannya sendiri, sedangkan kontrak dengan nominal gaji lebih kecil diserahkan ke kantor pajak. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar. Akibatnya Fan menerima hukuman tahanan rumah selama dua tahun, dan baru bisa kembali tampil di hadapan publik pada tahun 2020 (Jeong, 2019).

Contoh kasus melanggar moral adalah, melakukan tindakan tidak sopan di hadapan publik, terlibat dalam skandal seks, atau perselingkuhan. Pada tahun 2016, pasangan selebriti Tiongkok, Wang Baoqiang dan Ma Rong menjadi perbincangan utama di Weibo setelah mengumumkan resmi bercerai melalui akun Weibo masing-masing. Keduanya terlibat perseteruan yang menyita perhatian publik, hingga tahun 2018 Ma Rong terbukti berbohong. Dia menerima banyak kritik dan menjadi salah satu selebriti yang paling dibenci (Barnes, 2017). Kasus lainnya adalah Huo Zun, seorang penyanyi opera Beijing yang dituduh mantan pacarnya menjalin hubungan dengan perempuan lain. Tidak hanya itu, Huo juga terbukti menjelekkkan acara “Call Me By Fire” yang akan dibintanginya. Huo Zun akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi aktif di industri hiburan (Lee, 2021).

Tindakan pelarangan atau boikot pemerintah tidak hanya diberlakukan kepada selebriti Tiongkok, tetapi juga kepada selebriti dengan kewarganegaraan asing yang bekerja secara aktif di Tiongkok. Teresa Teng (Deng Lijun) penyanyi asal Taiwan diboikot pemerintah Tiongkok pada



tahun 1978 karena lagu-lagunya dianggap sebagai “polusi spiritual”, sehingga dilarang diputar di Tiongkok. Padahal Teresa tidak pernah tampil di Tiongkok sebelumnya. Xu dan Yang (2021) menyebutkan bahwa Teresa Teng merupakan artis asing pertama yang diboikot oleh pemerintah Tiongkok. Kasus lainnya adalah Zhao Lixin, aktor Tiongkok dengan kewarganegaraan Swedia. Pada tahun 2019, Zhao membuat pernyataan kontroversial di akun Weibonya dengan mempertanyakan mengapa tentara Jepang tidak menghancurkan Museum Beijing pada masa perang Tiongkok-Jepang. Akibatnya, dia dikritik dan diboikot oleh berbagai media. Banyak yang mengatakan dia lupa dengan identitas keluarganya sebagai orang Tiongkok dan diminta kembali ke Swedia (Koetse, 2019).

Dampak lanjutan yang dialami selebriti yang terkena boikot adalah, setelah masa hukumannya selesai biasanya selebriti akan kesulitan untuk meraih popularitasnya kembali. Citra mereka telah tercemar dan pandangan publik sudah berubah. Cui Jian merupakan penyanyi rock yang populer di Tiongkok pada tahun 80-an. Cui sangat digemari anak muda dan albumnya terjual lebih dari sepuluh juta kopi di Asia. Dia diboikot oleh pemerintah akibat penampilannya di depan mahasiswa yang melakukan demo di Lapangan Tiananmen 1989. Lagu “Nothing to My Name” yang dinyanyikannya memang dikenal sebagai “lagu kebangsaan” mahasiswa yang melakukan demo. Akibatnya lirik lagunya disensor dan dia dilarang untuk mengadakan konser. Larangan tersebut berlaku selama 20 tahun, Cui baru tampil kembali pada tahun 2012. Kini dia sudah kembali berkarir secara normal, namun popularitasnya tidak lagi seperti dulu (Watt, 2015).

Perilaku selebriti seperti dalam contoh-contoh di atas dianggap sudah menyimpang dari nilai-nilai budaya masyarakat Tiongkok. PKT sebagai pemimpin negara tentunya memiliki wewenang untuk mengembalikan ke tempatnya. Salah satu cara yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menerapkan berbagai larangan dan pembatasan. Semua itu kemudian menciptakan sebuah fenomena yang pada praktiknya sama dengan yang dikenal masyarakat dunia sebagai *Cancel Culture*.

Penelaahan lebih mendalam menunjukkan bahwa, penyebab pelarangan sebelum dan sesudah tahun 2000 berbeda. Praktik pelarangan yang terjadi sebelum tahun 2000 mayoritas disebabkan karena melanggar ideologi PKT. Hal itu terlihat dalam kasus Teresa Teng dan Cui Jian. Setelah tahun 2000 hingga saat ini muncul penyebab lainnya yaitu pelanggaran nilai moral seperti yang dilakukan oleh Kris Wu, Zheng Shuang, Huo Zun, Wang Baoqiang dan Ma Rong. Nilai-nilai moral dianggap sebagai nilai dasar yang seharusnya sudah melekat dalam setiap individu masyarakat Tiongkok, sehingga ketika selebriti melakukan tindakan yang bertentangan akan menerima pandangan negatif dan sanksi.

Perkembangan internet dan media sosial juga berpengaruh terhadap perkembangan *Cancel Culture* dalam industri hiburan Tiongkok. Segala sesuatu yang terunggah di dunia maya cepat tersebar dan dapat diakses dengan mudah. Segala yang diunggah di media sosial akan terekam selamanya dan tidak dapat dihapus secara total. Hal itu membuat PKT menjadi lebih mudah dalam mengawasi dan menemukan selebriti yang melanggar peraturan. Ketika ditemukan, pemerintah segera menutup akun media sosial dan menghapus segala konten di internet yang berhubungan dengan selebriti tersebut, sehingga akses selebriti itu kepada penggemar dan sebaliknya terputus



secara otomatis. Langkah tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah dan biasanya terjadi secara cepat.

Dampak *Cancel Culture* terhadap Selebriti

Kehidupan selebriti selalu menjadi pusat perhatian dan sorotan media, karena itu mereka termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang berpengaruh. Kendati demikian, banyak selebriti yang cenderung memanfaatkan popularitasnya semata untuk kepentingan pribadi dan melakukan hal-hal yang salah. Jika hal itu terjadi, pemerintah perlu mengambil langkah sebagai bentuk peringatan sekaligus hukuman, agar selebriti tersebut menyadari perbuatannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Dalam artikel ini dibahas tiga contoh kasus selebriti yaitu Zheng Shuang, Kris Wu, dan Zhang Zhehan. Ketiganya dipilih atas dasar perbedaan jenis kasus dalam variabel penyebab, kronologi dan sanksi yang diterima. Zheng Shuang dan Zhang Zhehan merupakan selebriti asal Tiongkok, namun memiliki jenis kasus yang berbeda. Kasus Zheng Shuang merupakan pelanggaran moral dan hukum, sedangkan kasus Zhang Zhehan disebabkan karena dianggap tidak menjunjung nasionalisme. Sedangkan kasus Kris Wu merupakan kasus pelanggaran moral. Kris Wu merupakan warga negara Kanada, maka dapat menjadi contoh bahwa berlaku perlakuan yang sama dari pemerintah terhadap selebriti yang aktif di Tiongkok, baik warga RRT maupun yang kewarganegaraan asing.

Kasus Zheng Shuang

Zheng Shuang (郑爽) adalah aktris Tiongkok yang lahir pada tahun 1991. Zheng memulai debutnya di tahun 2009 melalui drama “Meteor Shower”. Zheng membintangi banyak drama dan menjadi salah satu aktris paling populer di dalam dan luar Tiongkok. Pada tahun 2017, Zheng masuk ke dalam daftar “30 Under 30 Asia” yang dirilis Forbes Tiongkok, yaitu sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di Tiongkok. Namun, pada tahun 2021 Zheng Shuang terlibat dalam kasus yang menyebabkan karirnya menurun drastis. Zheng mendapat banyak kecaman dan dianggap telah kehilangan nilai moral.

Pada awal tahun 2021, Zheng Shuang kedatangan menggunakan ibu pengganti untuk melahirkan anaknya di Amerika Serikat (AS). Kejadian dimulai pada tanggal 18 Januari 2021 saat Zhang Heng, aktor sekaligus mantan suami Zheng Shuang membuat unggahan di Weibo (sosial media yang digunakan oleh orang Tiongkok) bahwa dia dan Zheng Shuang memiliki dua orang anak. Pernyataan itu menimbulkan kebingungan karena sebelumnya tidak pernah terdengar kabar mengenai kehamilan Zheng Shuang. Keduanya memang pernah menikah pada bulan Januari 2019 namun bercerai pada akhir tahun 2019. Kemudian Zhang merilis pernyataan bahwa kedua anaknya dilahirkan di bulan Desember 2019 dan Januari 2020 dengan bantuan ibu pengganti. Zhang menyertakan foto akte kelahiran kedua anaknya dan tertulis nama Zhang Heng dan Zheng Shuang sebagai orang tua. Ketika umur kandungan mencapai tujuh bulan, Zheng Shuang dan keluarganya ingin mengaborsi kedua calon bayi atau menyerahkan mereka untuk diadopsi, namun hal itu tidak dapat dilakukan. Akhirnya Zheng Shuang memilih untuk meninggalkan Zhang Heng dengan kedua anaknya di AS dan kembali ke Tiongkok seorang diri (Ji, Song, dan Wei, 2021).



Masalah penggunaan ibu pengganti tersebut menyita perhatian berbagai pihak. Sosial media Weibo ramai dipenuhi oleh forum diskusi dan komentar negatif. Media massa seperti CCTV, Sohu Video, dan Sina Blog ramai memberitakan kasus Zheng Shuang. Masyarakat menganggap Zheng Shuang membawa pengaruh buruk dan diminta untuk segera meninggalkan industri hiburan, namun beberapa pihak memilih untuk netral atas masalah tersebut. Pemerintah ikut memberikan kecaman kepada Zheng Shuang melalui berbagai media dengan menyatakan bahwa, penggunaan ibu pengganti merupakan hal yang dilarang di Tiongkok. Undang-Undang (UU) Administratif Teknologi Reproduksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2001, melarang perdagangan sperma, ovum, zigot, embrio dalam bentuk apapun dan institusi medis dilarang menggunakan segala bentuk teknologi pengganti. Jika melanggar akan didenda sebanyak 30.000 yuan. Namun, UU tersebut tidak menetapkan hukuman yang jelas untuk individu banyak pasangan yang menggunakan tenaga ibu pengganti di luar negeri. Meskipun demikian, Zheng tetap dianggap melanggar nilai etika karena dianggap telah melakukan eksploitasi dan perdagangan perempuan (Qian, 2019). Pada tahun 2016 pemerintah Tiongkok memang telah melonggarkan kebijakan satu anak, dan mengizinkan setiap keluarga memiliki dua anak, bahkan pada tahun 2021 setiap keluarga boleh memiliki tiga anak. Pemerintah Tiongkok terus mendorong pasangan muda untuk menikah dan memiliki anak tetapi bukan menggunakan ibu pengganti (Fang, 2019).

Tiga bulan kemudian Zheng Shuang tersandung kasus penghindaran pajak. Zheng Shuang dilaporkan menerima bayaran sebesar 160 juta yuan (setara dengan 354 juta rupiah) untuk membintangi drama barunya yang berjudul “A Chinese Ghost Story”. Jumlah ini setara atau bahkan lebih daripada yang diterima beberapa aktris Hollywood dan menjadikan Zheng Shuang salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut pelayanan pajak Kota Shanghai, nominal tersebut melanggar peraturan yang ditetapkan pihak penyiaran dan perpajakan di tahun 2018. Zheng Shuang bersama Zhang Heng membuat kontrak “yin dan yang” dimana ketika perjanjian dibentuk dibuat dua buah dokumen, dokumen asli dengan nominal bayaran yang lebih besar akan disimpan sedangkan dokumen lain dengan nominal bayaran lebih rendah akan diserahkan ke kantor pajak agar pajak yang dibayar lebih kecil. Dalam dokumen yang diserahkan ke kantor pajak Zheng Shuang hanya menuliskan 48 juta yuan (setara dengan 106 juta rupiah) sedangkan sisa bayarannya dikirim secara pribadi.

Akibat kasus penghindaran pajak, Zheng Shuang dikenai denda sebanyak 299 juta yuan (setara 659 miliar rupiah). Zheng Shuang yang sebelumnya diumumkan menjadi *brand ambassador* merek pakaian Prada, menjadi *cover model* untuk majalah Harper’s Bazaar China dan sedang bersiap mempromosikan tiga drama barunya, salah satunya “A Chinese Ghost Story”, semuanya harus dibatalkan. Acara yang telah dibintanginya dihapus dari berbagai platform. Biro Pusat Radio dan Televisi Negara dan Asosiasi Industri Pertunjukan Tiongkok mengeluarkan perintah untuk mengkritik tindakan Zheng Shuang dan tidak lagi tidak mengizinkan Zheng Shuang tampil di depan publik.



Kasus Kris Wu

Kris Wu atau Wu Yifan (吴亦凡) merupakan seorang aktor sekaligus penyanyi yang lahir di Guangzhou, Tiongkok pada tahun 1990. Kris lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Tiongkok sebelum pindah ke Kanada saat berumur 15 tahun. Meskipun lima tahun kemudian dia kembali ke Tiongkok namun saat ini Kris merupakan seorang warga negara Kanada. Pada tahun 2012, Kris memulai karirnya sebagai anggota *boyband* Korea Selatan bernama EXO. Pada awal masa debutnya, EXO terdiri dari 12 anggota yang terbagi menjadi dua subgrup yaitu EXO-K (EXO Korea) berfokus melakukan aktivitas di Korea Selatan dan EXO-M (EXO Mandarin) berfokus melakukan aktivitas di Tiongkok dengan Kris sebagai ketua grup. EXO-M menerima sambutan hangat dari masyarakat dan menjadi salah satu grup paling populer di Tiongkok. Pada tahun 2014 Kris memutuskan keluar dari EXO dan memulai karirnya sebagai artis solo. Tidak butuh waktu lama untuk Kris meraih popularitasnya dan menjadi selebriti papan atas di Tiongkok. Dibuktikan dengan akun Weibonya diikuti lebih dari 50 juta orang, dalam dua tahun membintangi sembilan film dan lagu-lagunya juga berada di bagian atas peringkat musik.

Pada tahun 2021 Kris Wu terlibat dalam kasus penipuan dan pelecehan seksual kepada perempuan berumur 17-19 tahun. Pada tanggal 8 Juli 2021, Du Meizhu, seorang perempuan berumur 19 tahun mengunggah postingan panjang di akun Weibo pribadinya dan mengungkapkan perilaku Kris Wu. Du mengatakan Kris sering merayu perempuan lain dan mengajak mereka bertemu dengan alasan menawarkan pekerjaan. Kemudian, Kris akan membuat mereka mabuk dan melakukan hubungan intim dengan mereka. Du juga menyertakan tangkapan layar isi pesannya dengan Kris dan agensinya yang menunjukkan dirinya telah ditipu dan menerima banyak dampak negatif selama ini. Kemudian bukti-bukti lain dari Du Meizhu dan korban-korban baru terus bermunculan. Terhitung dalam waktu satu bulan ada 24 perempuan yang menyatakan dirinya sebagai korban.

Kris Wu dan agensinya berulang kali menyangkal semua tuduhan tersebut dan menyatakan akan mengambil langkah hukum atas pernyataan Du Meizhu. Kedua pihak sempat mencoba membuat kesepakatan, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai. Akhirnya pada tanggal 31 Juli 2021 Kris Wu dinyatakan ditahan oleh polisi dan dinyatakan sebagai kriminal dan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan Kris Wu mendapat banyak perhatian, terutama dari kaum perempuan, biasanya kasus seperti ini diabaikan oleh polisi dan susah untuk dibawa ke pengadilan. Banyak perempuan yang menyatakan dukungan kepada Du Meizhu dengan menggunakan tagar #MeToo dan #GirlsHelpGirls. Tagar #MeToo merupakan tagar internasional yang digunakan untuk berbagi pengalaman dan menyatakan dukungan kepada sesama perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Kasus ini menandakan adanya perubahan tanggapan pihak berwenang terhadap kasus pelecehan seksual perempuan di Tiongkok.

Akibatnya, Kris menerima kecaman dan sanksi dari pemerintah. Komite Pusat Keamanan Internet dan Informasi (中央网络安全和信息化委员会 *zhōngyāng wǎngluò ānquán hé xìnxī huà wěiyuánhui*) menutup akun media sosial pribadi Kris, ribuan akun grup penggemar, tagar dan postingan yang mencoba membelanya. Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengannya seperti Porsche, Louis Vuitton, dan Tencent memilih memutuskan kontrak. Lagu-lagunya dihapus dari berbagai platform. Proyeknya yang akan tayang dibatalkan dan perannya digantikan aktor



lain. Hal ini menunjukkan meskipun Kris adalah warga negara asing tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Tiongkok.

Kasus Zhang Zhehan

Zhang Zhehan (张哲瀚) adalah seorang aktor Tiongkok yang lahir pada tahun 1991. Zhang memulai debutnya di tahun 2010 dan mencapai puncak karirnya di tahun 2021 setelah membintangi drama “Word of Honor”. Selama tayang di bulan Februari dan Maret, drama ini ditonton 1,2 miliar kali di aplikasi Youku dan episode pertamanya ditonton 8,7 miliar kali di YouTube. Hanya dalam beberapa bulan Zhang membintangi lebih dari 20 iklan dan menjadi salah satu aktor yang paling dicari di tahun 2021. Tidak lama kemudian Zhang terlibat dalam serangkaian kasus yang mengakibatkan karirnya berhenti.

Zhang Zhehan terlibat dalam sebuah kasus akibat fotonya yang diyakini masyarakat di depan kuil Yasukuni di Jepang. Foto tersebut sebenarnya diambil pada tahun 2018 dan diunggah di akun Weibonya namun muncul kembali di tahun 2021. Masyarakat menuduh Zhang sengaja berkunjung ke kuil Yasukuni namun dibantah oleh Zhang Zhehan. Zhang mengatakan hanya berkunjung ke Jepang sebagai turis dan tidak mengetahui info mengenai bangunan di fotonya. Dalam waktu singkat foto tersebut menjadi viral di Weibo. Zhang Zhehan menerima banyak kecaman dan memicu kemarahan masyarakat serta media.

Kuil Yasukuni adalah kuil yang terletak di kota Tokyo, Jepang dan dianggap sebagai tempat kontroversial bagi masyarakat Tiongkok. Dalam artikel yang ditulis oleh Michiaki Okuyama (2009), disebutkan bahwa kuil ini selesai dibangun pada tahun 1869 dan didirikan sebagai tempat pemujaan para prajurit Jepang yang gugur dalam perang demi kepentingan negara. Semakin lama daftar korban semakin panjang hingga mencapai jutaan. Termasuk di dalamnya para penjahat perang kelas A Perang Dunia II. Penambahan penjahat perang menimbulkan kritik dari negara-negara Asia, termasuk Tiongkok. Akibatnya, Kuil Yasukuni meninggalkan bekas luka pada jiwa orang Tiongkok dan menjadi tempat yang tabu untuk dikunjungi ketika berada di Jepang.

Zhang Zhehan juga terlibat dalam kasus lain dimana fotonya di tahun 2019 saat menghadiri acara pernikahan temannya di Kuil Nogi menimbulkan perdebatan. Kuil Nogi adalah kuil yang didedikasikan untuk Nogi Maresuke, jenderal Jepang yang memimpin pasukan dalam Pertempuran Port Arthur (1984) di Tiongkok dan memakan puluhan ribu korban. Selain itu, di acara tersebut Zhang juga berfoto bersama Dewi Sukarno, figur yang dianggap kontroversial oleh masyarakat Tiongkok karena mendukung aksi jaringan hotel Jepang, APA Group, yang menyangkal keterlibatannya dalam Pembantaian Nanjing. Meskipun Zhang hanya datang sebagai tamu undangan namun hal ini tetap tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat Tiongkok dan Zhang dianggap sebagai seorang pengkhianat.

Zhang merilis surat permintaan maaf di akun Weibo miliknya pada tanggal 13 Agustus 2021 yang berisi :



Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

“今天我为曾经无知的自己而羞愧，更要对之前不当行为深刻地道歉。我参加了一位朋友在日本举办的婚礼，对于婚礼举办场所的历史背景和参加婚宴的其他人政治背景失察，这是我的过错。以前在各地旅游时我喜欢随意拍照，由于对当地建筑物当地历史知识的欠缺，以及在拍照时对入画内容的不谨慎，我拍的照片合影里面出现过严重伤害国人感情的内容，我也在此郑重道歉，对不起。我不亲日，我是中国人！我从未在任何场合发表过有损祖国的言论！我深深爱我的祖国！大家可以批评我无知。我特别感谢大家的监督和批评，作为公众人物，我更应当时刻牢记历史伤痛，以后我会更认真的学习历史文化知识，丰富自己的专业素养，更加严谨和自律，再次郑重的道歉。
张哲瀚
2021年8月13日”

“Hari ini saya merasa malu pada diri saya yang tidak tahu apa-apa dan saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Saya menghadiri acara pernikahan teman di Jepang, ini adalah kesalahan saya mengabaikan latar belakang sejarah tempat pernikahan dan tamu politik yang hadir. Dulu, ketika saya mengunjungi negara lain, saya suka mengambil foto secara acak, karena kurangnya pengetahuan tentang bangunan dan sejarah lokal serta tidak hati-hati saat mengambil foto, di dalam foto yang saya ambil ditemukan beberapa konten yang sangat merugikan perasaan orang-orang Tiongkok. Saya benar-benar minta maaf. Maafkan saya. Saya tidak mendukung Jepang, saya orang Tiongkok! Saya tidak pernah membuat pernyataan yang merugikan negara di segala situasi! Saya sangat mencintai negara saya! Kalian dapat mengkritik saya karena tidak tahu apa-apa. Saya berterima kasih atas pengawasan dan kritik semua orang. Sebagai seorang publik figur saya harus terus mengingat sakitnya sejarah. Kedepannya, saya akan mempelajari sejarah dan budaya dengan lebih serius, memperkaya kemampuan dan pencapaian, lebih teliti dan disiplin. Saya dengan tulus meminta maaf sekali lagi.
Zhang Zhehan
13 Agustus 2021”

Surat permintaan maaf Zhang ternyata tidak dapat meredam kemarahan masyarakat. Asosiasi Industri Pertunjukan Tiongkok mengecam Zhang telah merugikan negara dan membawa pengaruh buruk bagi masyarakat. Mereka sepakat untuk tidak lagi mengizinkan Zhang tampil di hadapan publik. Proyek lamanya dihapus dan proyek terbarunya dibatalkan. Selain itu, ada 25 perusahaan iklan memutuskan kontrak dengannya dan menyebabkan Zhang harus mengganti rugi sebesar 50 juta yuan.

Dari tiga kasus di atas, terlihat bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam memberikan larangan dan hukuman. Meskipun setiap kali muncul diawali dengan banyaknya pendapat dari



berbagai pihak, namun keputusan terakhir berada di tangan pemerintah. Pemerintah tidak mentoleransi kesalahan para selebriti dan menangani kasus dengan tegas. Lembaga-lembaga berwenang juga bergerak cepat dalam memberikan respon dan membuat keputusan. Pemerintah Tiongkok berpendirian bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh selebriti perlu dihentikan untuk mencegah penyimpangan nilai-nilai budaya. Selebriti perlu menyadari kesalahan mereka dan menjadi pelajaran bagi masyarakat.

Dampak *Cancel Culture* terhadap Industri Hiburan Tiongkok

Meskipun pemerintah sudah memberikan hukuman namun nyatanya masih banyak masalah dan pelanggaran baru yang muncul di dalam industri hiburan. Hal itu dianggap sebagai kekacauan dan dikhawatirkan dapat membawa pengaruh negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merasa perlu membuat perubahan dalam industri hiburan dengan memperketat pengawasan dan meningkatkan efisiensi agar lebih teratur. Pada tahun 2021, pemerintah Tiongkok membuat sebuah gerakan yang disebut Operasi Qinglang (清朗 *Qīnglǎng*) yang bertujuan untuk mengatasi kekacauan dan tindakan ilegal di dunia maya. 清朗 *Qīnglǎng* memiliki makna "bersih dan tidak terkontaminasi". Operasi Qinglang pernah dijalankan di tahun 2020, namun terhenti dan dimulai kembali di tahun 2021. Operasi ini dipimpin oleh Kantor Informasi Internet Tiongkok dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya.

Sejalan dengan dilaksanakannya Operasi Qinglang, pada tahun 2021 Kantor Informasi Internet Tiongkok merilis beberapa kebijakan ditujukan untuk seluruh pihak dalam industri hiburan. Seperti yang tertulis dalam Pengumuman Kantor Umum Administrasi Negara Radio dan Televisi tentang Penguatan Lebih Lanjut Manajemen Program Sastra dan Seni dan Personilnya oleh Departemen Propaganda PKT di antaranya:

1. Menolak orang yang melanggar hukum dan melanggar moral hadir di acara televisi.
2. Pemerintah secara tegas melarang pemujaan selebriti yang berlebihan.
3. Melarang memberikan gaji yang sangat tinggi kepada selebriti atau bintang tamu.
4. Tetap berpegang pada nilai-nilai politik & budaya, mengontrol secara ketat budaya asing yang masuk dan mengkritik nilai yang tidak sesuai seperti pria feminim.
5. Setiap profesi menjunjung tinggi moral dan kejujuran. Tidak menggunakan profesi untuk kepentingan pribadi seperti meraih ketenaran atau kekayaan.
6. Memberikan tanggung jawab penuh kepada lembaga yang mengatur televisi, radio, dan platform *online*.

Suksesnya Operasi Qinglang sangat tergantung pada kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menguasai dunia maya. Pada tanggal 9 Maret 2022, Sheng Ronghua, wakil direktur Kantor Informasi Internet Tiongkok mengadakan pertemuan bersama para pemimpin perusahaan Tencent, Baidu, dan lainnya untuk mempresentasikan peraturan Operasi Qinglang 2022 (Deng & Qu, 2022). Menurut Tan Liwei (2022) pertemuan tersebut menghasilkan empat poin kesepakatan utama yaitu :

1. Mengajak perusahaan untuk memperdalam pengertian akan Operasi Qinglang.
2. Perusahaan-perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan mereka.



Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

3. Mencari cara seperti mengendalikan topik di internet dan menghapus unggahan agar tidak terjadi kekacauan besar.
4. Memperkuat keamanan perusahaan dan meningkatkan komitmen politik para petinggi perusahaan.

Pada tanggal 17 Maret 2022, Kantor Informasi Internet Tiongkok melaporkan pencapaian Operasi Qinglang selama satu tahun ini. Totalnya sudah terjaring lebih dari 22 juta informasi ilegal, lebih dari 2160 aplikasi ilegal, lebih dari 1,3 juta akun ilegal dan lebih dari 3000 situs ilegal telah ditutup. Pencapaian ini menunjukkan Operasi Qinglang yang dijalankan pemerintah cukup efektif untuk membersihkan kekacauan di dunia maya. Kebijakan-kebijakan baru menciptakan lingkungan industri hiburan yang semakin ketat. Larangan-larangan dari pemerintah menyebabkan selebriti semakin tidak memiliki kebebasan dalam berkarya dan menampilkan dirinya. Namun, bagi RRT hal itu membawa keuntungan bagi pemerintah karena tujuan untuk mengatasi kekacauan dalam industri hiburan terwujud secara perlahan sehingga di masa depan akan terbentuk sebuah lingkungan industri hiburan yang lebih teratur dan selebriti-selebriti baru dengan citra yang lebih bersih seperti yang diinginkan PKT.

KESIMPULAN

Cancel Culture merupakan fenomena pemboikotan kepada seseorang akibat tindakan atau perkataan melanggar aturan atau moral. Berbeda dengan di negara lain, sistem *Cancel Culture* di Tiongkok lebih didominasi oleh peran aktif pemerintah atau PKT. Demi mengendalikan industri hiburan dan menjaga nilai-nilai dasar budaya Tiongkok PKT tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada selebriti yang dianggap melakukan penyimpangan. Hasil putusan PKT bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam menjalankan tugasnya PKT dibantu lembaga lainnya, yaitu Departemen Propaganda, Kementerian Kebudayaan, Biro Pusat Radio dan Televisi Negara dan Kantor Informasi Internet Tiongkok yang saling bekerja sama dalam mengatur industri hiburan.

Fenomena *Cancel Culture* dalam industri hiburan Tiongkok menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebelum tahun 2000-an kasus *Cancel Culture* mayoritas terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ideologi, sedangkan setelah tahun 2000-an hingga saat ini mayoritas disebabkan karena adanya pelanggaran moral masyarakat. Selain itu, perkembangan internet dan media sosial juga ikut memudahkan kerja PKT dalam mengawasi dan menemukan selebriti yang melanggar peraturan.

Fenomena *Cancel Culture* tentunya membawa dampak langsung kepada selebriti yang melanggar peraturan. Mereka biasanya akan menerima kecaman dari berbagai pihak dan serangkaian sanksi dari pemerintah. Hal ini berlaku bagi setiap selebriti yang aktif bekerja di Tiongkok, baik warga negara Tiongkok ataupun warga negara asing. Jenis sanksi dan jangka waktunya tidak tentu, semua tergantung dari keputusan PKT. Pada tahun 2021 pemerintah menjalankan Operasi Qinglang untuk mengatasi kekacauan dan tindakan ilegal di dunia hiburan melalui dunia maya. Sejalan dengan dilaksanakannya Operasi Qinglang, dibentuk kebijakan-kebijakan baru dan pemantauan tanpa henti dari Kantor Informasi Internet Tiongkok sebagai lembaga pemimpin Operasi Qinglang. Operasi Qinglang menunjukkan hasil yang efektif. Hal itu



Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

antara lain terbukti dengan adanya jutaan informasi ilegal yang dihapus dan ribuan akun serta situs ilegal yang berhasil ditutup oleh pemerintah. Bagi pemerintah RRT keberhasilan operasi Qinglang adalah prestasi besar, namun bagaimana dengan hak dan kreativitas warganya? Hal itu tentu merupakan pertanyaan lanjutan yang menarik untuk diteliti lebih jauh.

REFERENSI

- Barnes, Richard. (2017). China's Most-Discussed Love Triangle: Wang Baoqiang, Ma Rong and Song Zhe. Diakses dari <https://www.whatsonweibo.com/chinas-discussed-love-triangle-wang-baoqiang-ma-rong-song-zhe/>
- Caughey, AJ & Shen Lu. (2022). How the CAC became Chinese tech's biggest nightmare. Diakses dari <https://www.protocol.com/china/china-cac-tech-crackdown>
- Correspondents. (2021). China Cracks Down on Digital Fandoms: Behind the "QingLang" Operation. Diakses pada tanggal 25 April 2022 dari <https://www.glimpsefromtheglobe.com/regions/asia-and-the-pacific/china-cracks-down-on-digital-fandoms-behind-the-qinglang-operation/>
- Daily, Jing. (2022). Luxury Brands Need a Proactive Plan to Navigate China's Cancel Culture. Diakses dari <https://jingdaily.com/brands-need-a-proactive-plan-to-navigate-chinas-cancel-culture/>
- Davidson, H. (2021). Kris Wu arrest raises hopes for China's #MeToo movement. Diakses pada 20 April 2022 dari <http://www.theguardian.com/world/2021/aug/06/kris-wu-arrest-raises-hopes-for-chinas-metoo-movement>
- Davis, Rebecca. (2021). China Actor Zheng Shuang Probed for Tax Fraud After Alleged \$24.6 Million Payday for Single Show. Diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://variety.com/2021/biz/news/zheng-shuang-tax-fraud-1234962762/>
- Deng, Iris & Tracy Qu. (2022). China's internet watchdog pushes for deeper engagement with internet platforms in 2022 to clean, control online content. Diakses pada 27 Juni 2022 dari <https://www.scmp.com/tech/policy/article/3170153/chinas-internet-watchdog-pushes-deeper-engagement-internet-platforms>
- Departemen Propaganda PKT. (2021). 国家广播电视总局办公厅关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知发布日期. Diakses dari http://www.nrta.gov.cn/art/2021/9/2/art_113_57756.html
- Dershowitz, A. M. (2020). Cancel culture: The latest attack on free speech and due process. Hot Books.
- Gan, Nectar. (2021). Accused of abandoning two babies in the US, this Chinese celebrity has sparked a national debate about surrogacy. Diakses pada 23 April 2022 dari <https://edition.cnn.com/2021/01/22/china/china-celebrity-surrogacy-scandal-dst-intl-hnk/index.html>
- Jeffreys, Elaine. (2010). Zhang Ziyi and China's Celebrity-Philanthropy Scandals. doi:10.5130/portal.v8i1.1627



Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

- Jeong, May. (2019). "The Big Error Was That She Was Caught": The Untold Story Behind the Mysterious Disappearance of Fan Bingbing, the World's Biggest Movie Star. Diakses dari <https://www.vanityfair.com/hollywood/2019/03/the-untold-story-disappearance-of-fan-bingbing-worlds-biggest-movie-star>
- Koetse, Manya. (2019). Chinese Actor Zhao Lixin Banned from Weibo over Comments on Second Sino-Japanese War. Diakses dari <https://www.whatsonweibo.com/chinese-actor-zhao-lixin-banned-from-weibo-over-comments-on-second-sino-japanese-war/>
- Lieming, F. (2019). Will China's "Two-child in One Family" Policy to Spur Population Growth Work?. *Population and Economics*, 3, 36.
- Lin, Wei Lee. (2021). Huo Zun Withdraws From Call Me By Fire After Ex-Girlfriend Posts Screenshots Of Him Saying He "Really Dislikes" Such Shows. Diakses dari <https://www.todayonline.com/8days/sceneandheard/entertainment/huo-zun-withdraws-call-me-fire-after-ex-girlfriend-posts>
- Liwei, Tan. (2022). QingLang Regulations, More of Them—and More Control on Chinese Social Media. Diakses pada 27 Juni 2022 dari <https://bitterwinter.org/qinglang-regulations-more-control-on-social-media/>
- Michiaki, O. (2009). The Yasukuni shrine problem in the East Asian context: Religion and politics in modern Japan. *Politics and Religion Journal*, 3(2), 235-251.
- Ng, E. (2020). No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation. *Television & New Media*, 21(6), 621–627. doi:10.1177/1527476420918828
- Paine, S. (2002). *China in Disgrace: The Battles of Port Arthur and Weihaiwei*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511550188.008
- Putri, Eka Alisa. (2021). Mengenal Mengenal Kuatnya Cancel Culture di Korea Selatan, Karier Artis Bisa Hancur Hanya dengan Satu Masalah. Diakses pada 27 Juli 2022 dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012892248/mengenal-kuatnya-cancel-culture-di-korea-selatan-karier-artis-bisa-hancur-hanya-dengan-satu-masalah>
- Romano, Aja. (2021). The second wave of "cancel culture". Diakses dari <https://www.vox.com/22384308/cancel-culture-free-speech-accountability-debate>
- Sills, S., Pickens, C., Beach, K., Jones, L., Calder-Dawe, O., Benton-Greig, P., & Gavey, N. (2016). Rape culture and social media: young critics and a feminist counterpublic. *Feminist Media Studies*, 16(6), 935–951. doi:10.1080/14680777.2015.1137962
- Stratford, Timothy, dkk. (2018). More Officials Appointed to Lead Film and Media Authorities in China. Diakses pada 15 April 2022 dari <https://www.natlawreview.com/article/more-officials-appointed-to-lead-film-and-media-authorities-china>
- Sullivan, J., & Kehoe, S. (2019). Truth, Good and Beauty: The Politics of Celebrity in China. *The China Quarterly*, 1–16. doi:10.1017/s0305741018001285
- Tang, Q. (2019). Surrogacy in China: Public Opinion, Litigations, and Court Rulings. *Asian Social Science*, 15(10).



Received: Agustus 2022, Accepted: September 2022, Published: Oktober 2022

- Watt, Louise. (2015). Rocker Cui Jian says his music hasn't changed but China has. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2015/12/30/rocker-cui-jian-says-his-music-hasnt-changed-china-has.html>
- Wei, Liu. (2021). 中演协公布第九批网络主播警示名单 首次纳入违法失德艺人. Diakses pada 7 Maret 2022 dari <http://tech.china.com.cn/zby/20211123/382840.shtml>
- Wittfogel, K. A. (1951). The Influence of Leninism-Stalinism on China. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 277, 22–34. <http://www.jstor.org/stable/1030249>
- Xu, J., & Yang, L. (2021). Governing entertainment celebrities in China: practices, policies and politics (2005–2020). *Celebrity Studies*, 12(2), 202–218. doi:10.1080/19392397.2021.1912109
- Yang, Bingbing. (2021). China's Nationalist Cancel Culture. Diakses pada tanggal 2 April 2022 dari <https://thediplomat.com/2021/09/chinas-nationalist-cancel-culture/>